

## **BAB II**

### **PROSES PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) BATANG**

Pembangunan PLTU Batang sampai saat ini masih dilakukan. PLTU ini telah dimulai dari era presiden sebelumnya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) namun memiliki berbagai masalah terutama pada pembebasan lahan. Hingga masa pemerintahan SBY berakhir dan akhirnya dilanjutkan proses pembangunan oleh Presiden terpilih selanjutnya hingga sekarang yaitu Presiden Joko Widodo.

#### **A. Perencanaan Pembangunan PLTU Batang Era Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono**

Pembangunan PLTU Batang merupakan sebuah pembangunan yang telah direncanakan sejak tahun 2011 disaat era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyhono (SBY), dimana banyak sekali alasan-alasan yang membuat PLTU Batang layak untuk dibangun dan semua ini demi kesejahteraan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan listrik setiap tahunnya. Beberapa alasan dibalik adanya pembangunan PLTU ini ialah yang paling utama sebagai upaya mengantisipasi kekurangan pasokan daya listrik nasional. Karena pemerintah telah memprediksi bahwa pada tahun 2018 khususnya daerah Jawa-Bali akan mengalami krisis listrik yang nantinya akan sangat berdampak pada kegiatan ekonomi, sebagaimana contohnya ialah seperti pemadaman listrik bergilir yang apabila terjadi selama satu jam saja, industri baik skala kecil hingga skala yang besar akan mempengaruhi tingkat produksi industri tersebut dan juga akan berdampak pada sektor ekonomi. Hal ini merupakan contoh umum dimana sebuah krisis listrik bisa menjadi masalah

apabila tidak ditangani secepatnya (Kutnadi, 2013). Oleh karena itu, dengan adanya pembangunan PLTU Batang diharapkan akan membawa dampak positif bagi masyarakat, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Pembangunan ini juga diharapkan masyarakat dapat mengatasi masalah pemadaman listrik, baik secara bergilir atau disebabkan gangguan teknis. Dengan dibangunnya PLTU, ada jaminan nantinya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan listrik yang memuaskan (Shamudra, 2015).

Alasan lainnya ialah, mega proyek PLTU di Kabupaten Batang merupakan Program Induk pemerintah pusat yang diagendakan dalam MP3EI yang merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. *“Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development”* atau disingkat **MP3EI** adalah sebuah pola induk perencanaan ambisius dari pemerintah Indonesia untuk dapat mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran agar dapat dinikmati secara merata di kalangan masyarakat. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ini akan didukung berdasarkan potensi demografi dan kekayaan sumber daya alam, dan dengan keuntungan geografis masing-masing daerah. Lembaga ini diketuai oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dengan tugas dan fungsi sebagai berikut, (Ismail, Kendala Investasi Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pembangunan Proyek PLTU di Kabupaten Batang), 2014):

1. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan MP3EI;

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan MP3EI; dan
3. Menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan MP3EI.

Dipilihnya Kabupaten Batang sebagai tempat dalam pembangunan PLTU sebesar 2x100 MW ini di Pantai Denasri Kulon, Ujungnegoro, Celong, dan Pelabuhan Celong Desa Kedawung, dikarena keempat lokasi tersebut tanahnya dinilai cocok untuk membangun PLTU dan secara RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dimana empat lokasi tersebut juga sudah diarahkan untuk sebagai wilayah pengembangan energi dan industri. Selain itu, garis pantai di Batang juga dinilai relatif stabil dan kedalaman lautnya mencukupi sebagai pembangunan pelabuhan untuk sarana pemasok batubara.

Setiap pembangunan pasti akan memiliki dampak, baik itu dampak yang positif maupun negatif. Pembangunan PLTU Batang juga akan menimbulkan dampak baik dan buruk. Contoh dampak baiknya ialah dari sisi publisitas, dimana daerah Batang bisa sangat diuntungkan. Penempatan proyek PLTU di Batang juga secara tidak langsung akan dapat mengangkat citra Kabupaten Batang, khususnya di kalangan investor sehingga mereka tidak ragu menanamkan investasinya di Batang. Apabila nantinya ada investor besar yang mau untuk mengawali masuk ke daerah Batang, maka diharapkan nantinya akan bermunculan investor-investor lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan investasi mereka di daerah Batang, karena daerah Batang merupakan daerah yang memiliki potensi

sumber daya alam yang cukup melimpah dan belum dimanfaatkan. Banyak sekali dampak positif yang bisa didapatkan dari pembangunan PLTU Batang yang dalam jangka pendek ialah, pembangunan PLTU ini akan banyak sekali menyerap tenaga kerja dalam berbagai tingkatan. Apabila banyak warga Batang yang nantinya akan bekerja di Proyek PLTU Batang, maka secara tidak langsung hal tersebut dapat meningkatkan roda perekonomian. Warga sekitar Batang dapat pula membangun perumahan yang nantinya bisa dijadikan investasi kedepannya seperti penyewaan atau kontrakan untuk para pekerja-pekerja yang datang dari luar kota yang bekerja di PLTU Batang, dan hal ini juga akan memberikan pengaruh yang baik atau positif secara tidak langsung kepada pendapatan para pedagang di sekitar proyek pembangunan PLTU di Batang (Shamudra, 2015) .

Kemudian, apabila melihat dari dampak buruknya pembangunan ini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, akan tetapi dampak yang akan ditimbulkan dari proyek PLTU Batang dinilai masih pada batas toleransi dan tidak akan sampai menimbulkan sesuatu yang sangat besar pada aspek lingkungan sekitar proyek tersebut. Menurut Hakam Naja, Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengatakan bahwa masyarakat Jepang yang mempunyai budaya disiplin yang ketat juga membangun PLTU dan pernah menimbulkan kebocoran tetapi semuanya dapat dituntaskan tanpa harus menggagalkan kelangsungan proyek tersebut. Pembangunan PLTU Batang telah dipastikan sudah melalui kajian komprehensif sehingga masyarakat tidak perlu cemas terhadap adanya proyek tersebut (Kutnadi, 2013).

Berbeda dengan pihak yang kontra dengan pemerintah terkait pembangunan PLTU Batang. Juru kampanye Energi Greenpeace Indonesia, Desriko menyebutkan selain mengancam kedaulatan pangan di Kabupaten Batang karena lokasi proyek mengambil lahan persawahan masyarakat sekitar 226,4 hektar lahan sawah produktif akan tetapi juga memberikan dampak lingkungan. Greenpeace menyebutkan air buangan dari operasi PLTU akan mencemari perairan dan juga merusak terumbu karang, sehingga berdampak pada hasil tangkapan para nelayan tradisional yang mencari ikan di perairan dan pantai Ujungnegoro-Roban, yang merupakan salah satu perairan kaya ikan di wilayah Pantura Jawa Tengah (Lestari, 2015)

Sebuah penelitian kolaborasi antara Greenpeace dengan peneliti dari Universitas Harvard, Profesor Shannon Koplitz, mengatakan bahwa dampak buruk yang bisa ditimbulkan dari adanya PLTU ialah terancamnya kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU, dikarenakan masyarakat sering sekali terpapar polusi udara yang dihasilkan dari PLTU tersebut. Berdasarkan penelitian terbaru yang dilakukan Profesor Shannon Koplitz bersama tim penelitiannya dari Universitas Harvard, polusi udara yang dihasilkan PLTU batubara di Indonesia dapat menyebabkan kematian dini sekitar 6500 jiwa per tahun. Menurutnya emisi dari PLTU batubara itu membentuk partikel dan ozon yang berdampak buruk bagi kesehatan, dan hal ini lah yang menyebabkan kematian dini yang terjadi karena penyakit stroke sekitar 2700 orang, jantung iskemik sekitar 2300 orang, kanker paru-paru sekitar 300 orang, penyakit paru obstruktif kronik sekitar 400 orang, dan

penyakit pernapasan serta kardiovaskular lainnya sekitar 800 orang. Lalu menurut ahli batubara dan polusi udara Greenpeace Lauri Myllyvitra, kebanyakan dampaknya terjadi dekat PLTU. Polusinya itu tinggal di udara selama beberapa hari. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan permodelan atmosfer GEOS-Chem, yaitu model mutakhir untuk mengestimasi level polusi di udara. Peneliti melihat polusi udara di kawasan sekitar 42 PLTU yang beroperasi di Indonesia, seperti di Jepara, Banten, dan Batam. Penelitian ini juga menggunakan data *Global Burden Disease Indonesia* dan negara-negara di Asia Tenggara lainnya tentang risiko penyakit yang terkait polusi udara. Seperti diketahui, PLTU batubara menghasilkan polutan beracun di udara seperti merkuri, timbal, arsenik, kadmiun, dan partikel halus lainnya. Partikel halus berukuran PM 2.5 tersebut dapat masuk ke dalam paru-paru hingga aliran darah dan akhirnya berdampak buruk bagi kesehatan, seperti risiko penyakit jantung, stroke, dan masalah pada paru-paru (Maharani, 2015)

Meskipun penelitian telah dilakukan terhadap dampak buruk yang nantinya akan ditimbulkan, pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa pihaknya telah mempunyai sebuah upaya untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan sekitar PLTU dan dampak buruk bagi kesehatan, dimana PLTU Batang nantinya akan menggunakan teknologi *Ultra-Super-Critical* (USC) yang sangat ramah lingkungan dan efisien karena kondisi uap USC memberikan efisiensi panas yang lebih tinggi daripada kondisi uap konvensional seperti sub kritisal dan super kritisal. Efisiensi panas yang lebih tinggi berarti konsumsi batubara yang lebih

rendah dan juga menghasilkan emisi yang lebih rendah (PT.BPI, 2016). Mesin yang nantinya di gunakan di PLTU Batang ialah sebuah mesin Boiler yang dinamakan *supercritical* karena beroperasi pada temperatur kritis, yaitu di atas 3.200 psi atau 220,6 bar. Berbeda dengan boiler *superheater* yang membutuhkan suatu alat untuk memisahkan antara uap air dengan campuran uap dan air (biasa disebut *steam drum*), boiler *supercritical* tidak memerlukannya. Selama proses pembentukan uap air tidak akan terbentuk gelembung-gelembung uap (*bubbles*), karena tekanan air berada di atas tekanan kritisnya yang masih mungkin terbentuk gelembung uap. Hal ini menyebabkan penggunaan bahan bakar yang jauh lebih sedikit dan efisien, dan selanjutnya mengakibatkan produksi gas buang CO<sub>2</sub> menjadi berkurang. Sebenarnya istilah boiler tidak tepat digunakan pada boiler *supercritical*, karena pada proses pembentukan uap air yang tidak terjadi proses *boiling*/mendidih di dalamnya sehingga boiler *supercritical* lebih dikenal dengan sebutan *supercritical steam generator* (Onny, 2015).

Pembangkit listrik termal khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) akan semakin efisien ketika tekanan (*pressure*) dan Temperatur operasi uap (*steam*) semakin tinggi. Ketika *Main steam* beroperasi diatas titik kritis air (*Pressure* 221 Bar a dan Temperatur 374° C), maka PLTU tersebut disebut *Supercritical Power Plant*. Parameter Temperatur di hampir semua PLTU pasti diatas 374 deg C sehingga hanya parameter *pressure* yang menentukan suatu PLTU disebut *supercritical* atau *subcritical*. Jika *pressure Main steam* diatas 221 Bar maka disebut PLTU *supercritical*, sebaliknya jika dibawah nilai tersebut

disebut *subcritical*. Dari teknologi *supercritical steam generator* inilah diharapkan konsumsi batubara nantinya akan lebih rendah, dan emisi yang dihasilkan juga menjadi lebih minimal. Penggunaan teknologi terbaru di PLTU Batang ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi pengembangan pembangkit listrik di Indonesia, khususnya dalam membangun program pemerintah membangun pembangkit berkapasitas 35 ribu watt (Nurmayanti, 2016)

Setelah membicarakan terkait teknologi yang digunakan oleh PLTU Batang yang di klaim sebagai teknologi yang ramah lingkungan, maka yang bertanggung jawab dalam memegang pembangunan proyek PLTU Batang ini ialah PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI) yang merupakan konsorsium perusahaan Jepang-Indonesia *Electric Power Development.Ltd* (J-Power) dengan kepemilikan saham sebesar 34% dan Itochu Corporation merupakan perusahaan yang berbasis di Tokyo-Jepang dengan kepemilikan saham sebesar 32% dan PT. Adaro Power (AP) perusahaan yang berbasis di Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 34% (Afriyadi, 2016). PT. BPI dibentuk pada bulan Juli 2011 yang dulunya dipimpin oleh presiden direktur Kenichi Seshimo yang saat ini sudah diganti dan dipimpin oleh presiden direktur Mohammad Efendi. PT. BPI ini akan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) yang akan diterapkan di dalam proyek ini yaitu *Build-Own-Operate-Transfer* (BOOT) dengan masa konsesi selama 25 tahun dan (Adi, 2016) dengan penggunaan pembangkit listrik berbahan baku batu bara berkalori rendah. PLTU Batang disebut-sebut sebagai PLTU Terbesar se-Asia Tenggara ini berkapasitas 2x1000 Mega Watt (MW) dengan biaya pembangunan



yang direncanakan sebesar US\$ 4,2 Miliar. Proyek ini juga merupakan proyek pola KPS dan hal ini merupakan pertama kalinya di Indonesia sendiri dalam skala besar yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Hatta mengatakan, PLTU Jawa Tengah ini merupakan proyek pajakan pemerintah yang akan ditunjukkan kepada calon-calon investor lain agar ikut membangun proyek infrastruktur dengan mekanisme KPS (Basuki, 2011) .

Dokumen pelaksanaan dan penjaminan proyek PLTU Batang 2x1000 MW telah ditanda tangani pada tanggal 6 Oktober 2011 di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta. Dimana acara penandatanganan kontrak KPS PLTU Batang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Batang, dan Duta Besar Jepang, Direktur Utama PT. PLN (Persero), Direktur Utama PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero), serta PT. BPI. Dokumen yang ditandatangani terkait Proyek KPS PLTU Batang yaitu, (PT.PLN, 2011) :

- a. Perjanjian Jual Beli Listrik (*Power Purchase Agreement*) antara PT. PLN (Persero) dengan pihak pengembang listrik swasta PT. BPI

- b. Perjanjian Penjaminan (*Guarantee Agreement*) antara Menteri Keuangan RI dan PT. PII (Persero) sebagai penjamin dengan pihak pengembang listrik swasta PT. BPI
- c. Perjanjian Regres (*Recourse Agreement*) antara Menteri Keuangan RI sebagai penjamin dengan PT. PLN (Persero)
- d. Perjanjian Regres (*Recourse Agreement*) antara PT. PII (Persero) sebagai penjamin dengan PT. PLN (Persero)
- e. *Sponsor Agreement* untuk pengembang proyek yaitu PT. BPI

Penandatanganan dokumen proyek ini telah membuktikan bahwa skema KPS yang didasarkan pada proses yang terbuka, kompetitif, transparan dan akuntabel dapat dilakukan di Indonesia. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa apabila proses pengadaan proyek KPS dijalankan sesuai dengan prinsip yang sudah ditentukan, maka bisa didapatkan layanan infrastruktur dengan kualitas yang lebih bagus, lebih andal dan lebih efisien sehingga bisa memberikan dampak yang baik untuk Negara, khususnya terhadap APBN. Kedepannya, Pemerintah akan lebih mendorong peran lembaga pendukung KPS seperti PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk mendukung dan mengawasi proses pengadaan proyek KPS sehingga keberhasilan ini segera bisa dikembangkan di sektor dan proyek yang lain. Proyek ini mendapatkan

penjaminan pemerintah dengan menggunakan skema penjaminan bersama antara Pemerintah dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang memperoleh mandat berdasarkan Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjamin infrastruktur. Penjaminan untuk proyek KPS PLTU Batang mencakup kewajiban-kewajiban finansial PLN tertentu dalam *Power Purchase Agreement* (PPA), yang diantaranya termasuk kewajiban finansial PPLN terkait pembelian listrik bulanan dari *Independent Power Producer* (IPP). Pemberian jaminan pemerintah untuk proyek KPS PLTU Batang merupakan langkah maju dalam proses pembangunan infrastruktur di Indonesia karena terdapat skema penjaminan baru yang lebih transparan dan akuntabel melalui PT. PII sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal pemerintah (PT.PLN, 2011).

Setelah diresmikannya perencanaan pembangunan proyek PLTU Batang ini, nyatanya banyak warga Batang yang menolak dengan adanya pembangunan PLTU tersebut, berbagai alasan bermunculan dalam menolak adanya PLTU. Warga Batang merasa bahwa pembangunan PLTU Batang akan sangat merugikan warga Batang yang dimana lahan mata pencaharian mereka sebagai petani dan nelayan selama bertahun-tahun harus tergusur oleh adanya pembangunan PLTU ini. Pemerintah dan PT. BPI berusaha keras untuk memberikan pengertian kepada warga Batang bahwa pembangunan PLTU ini akan membawa dampak baik

kedepannya terhadap warga Batang. Warga yang tanahnya diambil alih oleh proyek ini pun tidak akan dibiarkan merugi begitu saja.

Khusus PT. BPI sebagai pemegang proyek PLTU ini telah melakukan banyak cara untuk meyakinkan warga bahwa ketika tanah mereka sudah diambil oleh PLTU ini. Contohnya dimulai pada tahun 2012, 7 (tujuh) desa terdampak PLTU diberi bantuan oleh PT. BPI, dimana PT. BPI mempunyai 5 bidang untuk fokus membantu warga Batang yaitu Infrastruktur, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dan Budaya beserta Keagamaan dan Lingkungan, contoh dari pembangunan infrastruktur adalah MCK dan pembuatan instalasi air bersih. Lalu dari segi kesehatan diadakan pula pengobatan massal bagi 7 desa terdampak agar kesehatan warga desa bisa terkontrol dengan baik, kemudian dalam bidang pendidikan PT. BPI juga memberikan pengetahuan kepada beberapa siswa SD di desa-desa tersebut terkait manfaat dari adanya PLTU bagi sumber listrik di Indonesia dan khususnya daerah Batang, ada pula pemberian donasi-donasi untuk bidang sosial dan budaya di desa-desa terdampak, dan pada sektor ekonomi PT. BPI membelikan sejumlah Kambing yang dimana akan diserahkan kepada warga untuk dirawat dan diberikan ilmu cara penggemukan Kambing tersebut dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang sebelumnya telah dibentuk oleh PT. BPI (CSRBPI, Hasil Implementasi Program CSR BPI 2012, 2016)

PT. BPI tidak berhenti memberikan bantuan bagi warga desa terdampak PLTU pada tahun 2012 saja tetapi bantuan terus dilanjutkan dari 2012 hingga 2016.

Bantuan yang diberikan selalu dalam bentuk yang bisa memajukan warga Batang dan mau beralih profesi untuk mencari mata pencaharian baru lainnya selain menjadi petani dan nelayan, karena bidang ekonomi adalah bidang yang paling krusial untuk warga Batang maka contoh kongkret lainnya yang bisa dilihat ialah PT. BPI telah membuat Kelompok Usaha Bersama (KUB) di desa-desa terdampak, dimana KUB tersebut bergerak di berbagai macam bidang usaha seperti simpan pinjam, budidaya belut, jasa katering dan laundry, produksi (rumahan dan konveksi) dan penggemukan kambing dan lain sebagainya, lalu pada peningkatan ekonomi lainnya seperti pembukaan koperasi dan penyediaan lapangan pekerjaan sementara bagi warga Batang seperti pembuatan Tas Rinjing, pembuatan emping dan lain sebagainya. Dari data terakhir PT. BPI tahun 2015 bantuan yang diberikan kepada warga terkait peningkatan ekonomi warga Batang terutama KUB saat ini sudah ada sekitar 1.416 warga yang bergabung dalam 85 KUB dari 9 Desa di Batang (CSRBPI, Hasil Implementasi Program CSR BPI 2015, 2016).

Pada Oktober 2016, selain memberikan program pemberdayaan masyarakat di wilayah Batang PT. BPI juga memberikan kompensasi sosial kepada warga Batang terdampak, dimana kompensasi ini merupakan salah satu program yang menjadi prioritas PT. BPI. Dalam program ini perusahaan memberikan bantuan dana tunai kepada petani penggarap terdampak dan buruh tani terdampak pembangunan PLTU. Selain itu, PT. BPI juga memberika lahan seluas 32 hektar bagi petani penggarap yang lahan tempat bekerjanya terkena dampak pembebasan

lahan PLTU. Lahan pengganti tersebut selanjutnya telah dibagi rata kepada 218 petani penggarap terdampak, dimana setiap petani mendapatkan lahan garapan sekitar 1.200 m<sup>2</sup> (PT.BPI, 2016).

Meskipun usaha yang dilakukan pemerintah dan PT. BPI terus dilakukan untuk warga Batang sejak 2012, nyatanya beberapa warga Batang masih tidak ingin tanahnya di ambil alih untuk pembangunan PLTU, ditambah lagi beberapa golongan masyarakat juga menuntut pemerintah untuk menghentikan proyek kotor ini. Hal ini lah yang membuat proyek PLTU Batang selalu mengalami kemunduran dan penundaan dalam pembangunannya dan juga sulitnya mendapatkan dana pinjaman dari *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC), masalah pembebasan lahan yang cukup rumit dan tidak kunjung selesai yang membuat JBIC tidak ingin menurunkan pinjaman dana untuk proyek PLTU ini.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan PLTU Batang bukan tidak ada pemecahannya. Pemerintah pusat dibantu oleh aparaturnya pemerintah daerah telah berupaya menyelesaikan kendala-kendala yang menghambat proses pembangunan proyek PLTU ini. Pihaknya sudah melakukan sejumlah upaya mengatasi persoalan itu. Antara lain, memberikan kemudahan fasilitas dukungan melalui rapat-rapat internal dengan pemilik lahan, membentuk tim terpadu Pemerintah Kabupaten Batang, untuk mempercepat perolehan lahan, memberikan Poskotis di masing-masing Balai Desa Ujung Negro, Karanggeneng, Ponowareng, untuk mempermudah proses perolehan lahan dengan koordinasi tim terpadu tingkat

Muspida setiap minggu, dan saat ini pun tim kecil tingkat kecamatan dan desa terus mengajak pemilik lahan untuk mau menjual lahannya (Ismail, Kendala Investasi Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pembangunan Proyek PLTU di Kabupaten Batang), 2014).

Pada tahun 2013, saat era kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudoyhono (SBY). Beliau sempat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang, Shinzo Abe di sela-sela KTT APEC, Nusa Dua Bali. Dimana dalam pertemuan tersebut presiden SBY tidak hanya membahas tentang kerjasama perdagangan antara Indonesia-Jepang, akan tetapi membahas juga terkait permasalahan proyek PLTU Batang yang tidak kunjung selesai. PM Jepang sempat mengeluhkan soal mandeknya proyek PLTU tersebut, seharusnya PLTU tersebut sudah mulai bisa dikerjakan pada tahun 2012 tapi hingga tahun 2013 proyek tersebut tidak mengalami perkembangan dalam pembangunannya terkait permasalahan pembebasan lahan, presiden SBY dan PM Jepang menyepakati diri untuk mencari solusi bersama terkait permasalahan tersebut, akan tetapi hingga era kepemimpinan presiden SBY berakhirpun, permasalahan PLTU tersebut masih belum terselesaikan (DetikFinance, 2013).

## **B. Pembangunan PLTU Batang Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo**

Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) proyek ini mendapatkan perhatian yang cukup serius. Pihaknya berjanji akan membantu proses pembebasan lahan agar proses pembangunan berjalan cepat. Presiden

Jokowi telah memberikan waktu hingga Juni 2015 lalu untuk masalah administrasi, sehingga peletakan batu pertama (*groundbreaking*) segera menyusul. Akan tetapi, tetap saja masalah pembebasan lahan masih belum selesai. Berbagai pihak dari pemerintahan pun mulai turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini, mulai dari Menteri Koordinator Kemaritiman, Kejaksaan Agung, Menteri Agraria, dan juga pemerintah daerah setempat (Listrik.org, PLTU Batang Terkendala Pembebasan Lahan, 2015). Pemerintahan era presiden Jokowi juga berencana akan merevisi Perpres Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Perpres Nomor 67 tahun 2005 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, hal ini dilakukan agar urusan pembebasan lahan cepat terselesaikan dan peletakan batu pertama juga dapat segera dilakukan (Gumelar S. P., 2015). Presiden Jokowi mengharapkan selesainya masalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah, dapat menjadi pemicu keberhasilan infrastruktur lainnya. Menurutnya apabila permasalahan PLTU Batang tidak kunjung selesai, para investor juga akan berfikir berkali-kali untuk mau menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini sebagai pemacu pemerintah dan pihak terkait agar cepat menyelesaikan permasalahan di PLTU Batang (MetroTVNews, 2016). Sama halnya dengan pernyataan Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menegaskan pembangunan proyek PLTU Batang di Jawa Tengah harus tetap berjalan demi ketersediaan listrik di pulau Jawa dan Bali. Jika pembangunan proyek ini gagal, maka akan berdampak pada citra investasi di



Indonesia. Hatta Rajasa juga meminta kepada PLN dan pengembang untuk mempercepat proses pembangunan dan segera menuntaskannya. Karena hal ini akan memberikan dampak buruk bagi Indonesia di mata para Investor baik dalam negeri maupun luar negeri (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2014).

Pembebasan lahan yang tidak kunjung selesai ini juga disebabkan karena adanya beberapa golongan masyarakat yang melihat bahwa proyek yang dibangun ini adalah proyek kotor yang bisa merusak lingkungan sekitar, hal ini membuat pemerintah semakin tegas dan menunjukkan bahwa teknologi yang digunakan dalam PLTU ini sangat ramah lingkungan, dimana teknologi yang digunakan ialah *Ultra-Super-Critical* dan penggunaan bahan bakar batu bara yang digunakan pun adalah batu bara yang berkalori rendah. Apabila ingin melihat dalam sisi lingkungan menurut kepala bidang pengkajian dampak dan pengembangan teknologi lingkungan hidup, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Otniel Moeda mengatakan bahwa pembangunan PLTU ini telah melalui proses Amdal dan telah memperhitungkan dampak sosio-ekonomi dan atas dasar itu, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup mendukung kelanjutan pembangunan proyek ini dikarenakan baik untuk kedepannya bagi kesejahteraan listrik Jawa-Bali terutama daerah Batang dan sekitarnya. Untuk masalah peraturan pembebasan lahan, PLN telah mengantongi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Perseroan juga telah menganggarkan nilai total pembebasan lahan yang diperkirakan membutuhkan

dana senilai Rp1,8 miliar (Listrik.org, PLTU Batang Terkendala Pembebasan Lahan, 2015).

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mundur terkait pembangunan tersebut. Sebab saat ini daerah Jawa khususnya Jawa Tengah membutuhkan pasokan energi yang menjadi kebutuhan vital, terutama listrik (Kencana, 2016). Kebutuhan energi listrik sudah sangat mendesak. Listrik menjadi kebutuhan dasar untuk menggerakkan lini industri lainnya. Gubernur Ganjar tidak mempermasalahkan jika harus berhadapan dengan pihak yang tidak setuju dengan pembangunan PLTU. Menurutnya listrik merupakan masalah serius. Batang merupakan sumber listrik utama. Ini yang membantu energi Indonesia menjadi mandiri. Tidak akan membangun pabrik jika tidak ada listrik. Menurutnya, pembangunan listrik dengan tenaga uap masih relevan dibangun di Indonesia. Listrik dengan tenaga batu bara dianggap masih relevan lantaran negara lain masih menggunakan skema yang serupa. Untuk penyediaan pasokan listrik, beberapa daerah di Jateng sendiri sedang mempersiapkan pembangunan, diantaranya Cilacap, dan Jepara (Tanjung Jati B). Untuk pembangunan pembangkit listrik yang ramah belum memberi manfaat secara cepat. Energi terbarukan seperti angin, matahari, hingga panas bumi dinilai belum bisa dieksplorasi dengan baik (Nurdin, 2016).

Pada akhirnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga telah mengeluarkan izin penetapan lokasi yang akan dijadikan pembangkit. Dengan dikantonginya izin ini oleh PLN diharapkan proses pembebasan lahan akan menjadi

lebih cepat, sehingga investor juga dapat melakukan *financial closing*. Wakil Ketua Unit Pelaksanaan Program Pembangunan Ketenagalistrikan (UP3KN) Agung Wicaksono menyebutkan proses administrasi setelah diterbitkannya izin penetapan lokasi tersebut akan sepenuhnya selesai pada Oktober mendatang. Hal ini membuat Presiden Jokowi lebih optimistis lagi, bahwa proses administrasi dapat selesai bulan ini disusul dengan pembebasan lahan (Stefanie, 2016).

Setelah 4 tahun tersendatnya proyek pembangunan PLTU Batang terkait permasalahan pembebasan lahan, akhirnya pada tanggal 9 Juni 2016 PLTU Batang resmi mendapatkan *Financial Closing*, proyek pembangunan PLTU Batang mendapat pinjaman dari JBIC sebesar US\$ 1,92 Miliar (48 persen dari biaya investasi) dan konsorsium bank lainnya yang sebagian besar dari Jepang yaitu Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Mizuho Bank Ltd., Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, Shinzei Bank Ltd., Norinchukin Bank, dan dua perbankan dari Singapura yakni DBS Bank dan Overseas Chinese Banking Corporation Ltd., sebesar US\$ 1,28 Miliar (32 persen dari nilai investasi) dan sisanya 20% investasi disediakan oleh perusahaan PT. BPI (Gumelar G. , 2016)

Penandatanganan *financial closing* proyek PLTU Batang disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo, dan juga disaksikan langsung oleh Menteri ESDM, Sudirman Said, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Menteri Keuangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darwin Nasution mengatakan bahwa pemerintah sudah

berkomitmen untuk selalu mendukung pembangunan infrastruktur yang tujuannya demi kesejahteraan masyarakat. Dimana proyek PLTU Batang adalah proyek ketenagalistrikan pemerintah Indonesia pertama, dan dengan adanya *financial closing* ini secara resmi pembangunan fisik PLTU telah dimulai dan pemerintah mempunyai garansi disana. Adanya pencapaian ini juga membuktikan bahwa upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu menyelesaikan persoalan yang ada dalam pembangunan infrastruktur yang mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012, Perpres Nomor 38 tahun 2015 dan Perpres Nomor 75 tahun 2014 (NA, 2016). Peresmian pembangunan proyek PLTU Batang inipun dilakukan dengan penyerahan *Certificate of Loan Agreement* dari JBIC kepada PT. BPI, penyerahan *Certificate of CP Completion Financing Date Certificate* dari PLN kepada PT. BPI dan penyerahan Pernyataan Efektif Penjaminan Pemerintah dari Kementerian Keuangan dan Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) kepada PT. BPI (Ida, 2016).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berharap pembangunan infrastruktur kelistrikan PLTU Batang tersebut rampung dalam 36 bulan atau tiga tahun. Jika selesai, diyakini cadangan listrik untuk Pulau Jawa sebanyak 30 persen akan tersedia. Sudirman Said mengatakan bahwa dengan selesainya pembangunan PLTU Batang akan menambah pasokan untuk Jawa. Artinya, Jawa yang membutuhkan *reserve margin* (cadangan untuk antisipasi) 30 persen bisa terjaga (Miftahudin, 2016).

Presiden Direktur PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI), Mohammad Effendi menjelaskan dengan sudah tercapainya kesepakatan mengenai pembiayaan, perusahaan akan segera memulai proses konstruksi PLTU yang akan menggunakan teknologi *ultra-super-critical* dan sistem pengolahan gas buang yang dapat meminimalkan gas emisi yang ramah lingkungan. Lebih lanjut Presiden Direktur PT. BPI berharap bahwa perusahaan PLTU dapat beroperasi setelah masa pembangunan yang berlangsung sekitar 48 bulan, dan bisa beroperasi secara komersial pada tahun 2020. Sementara untuk kontraktor pelaksana konstruksi atau *engineering, procurement & construction* (EPC), telah ditunjuk Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd. yang akan menggarap porsi *offshore*, dan Sumitomo Corporation untuk menggarap bagian *onshore*, yang serah terima situs (*site handover*) kepada kontraktor telah dilaksanakan pada 30 April silam. Sebelumnya konstruksi pembangkit juga siap dilakukan karena PT. BPI telah melakukan berbagai persiapan di lokasi proyek, pembuatan jalan konstruksi sementara dan drainasi, pembuatan saluran air hujan, penyediaan lahan pengganti beserta irigasinya, dan pembuatan sistem terasering pada bukit yang tidak dipotong. Dengan begitu, pembangkit sudah benar-benar siap dibangun (Murdifi, 2016)

PLTU Batang akan memanfaatkan pasokan batubara nasional. Hal ini akan membantu PLN menurunkan biaya pokok produksi (BPP) dan menurunkan subsidi pemerintah kepada PLN. Selain itu, proyek ini akan membuka peluang lapangan kerja kepada minimum 5.000 penduduk setempat dan memberi peluang partisipasi komponen lokal dalam proses produksinya, dan selanjutnya hal ini akan mendorong

bergulirnya roda ekonomi nasional (Ekon, 2014). Kehadiran PLTU Batang diharapkan dapat memperbaiki cadangan pembangkit serta meningkatkan kendala sistem Jawa-Bali, sehingga kondisi siaga atau kritis akibat kekurangan pembangkit listrik tidak terjadi. Saat ini kapasitas terpasang sistem Jawa-Bali sebesar 33.863 MW dengan daya mampu 31.614 MW dan beban puncak 24.589 MW (Wicaksono, 2016).

Sebelumnya aksi protes warga dalam menolak pembangunan PLTU kurang mendapat respon yang positif oleh pihak pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat. Oleh karena itu pembangunan PLTU Batang banyak menarik peran NGO, khususnya NGO yang bergerak dalam bidang lingkungan untuk ikut berkontribusi membantu warga Batang untuk mendapatkan hak-hak mereka kembali dan menggagalkan pembangunan PLTU tersebut yang mengancam kelangsungan hidup lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Salah satu NGO yang ikut berkontribusi dalam membantu warga Batang ialah Greenpeace.